

ARTIKEL

**PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF
ASSESSMENT DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)**



Oleh :

Ayu Ajeng Prastiwi
0713010239/FE/AK

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2011**

USULAN PENELITIAN

PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)

Yang diajukan

Ayu Ajeng Prastiwi
0713010239/FE/AK

Telah Disetujui Untuk Diseminarkan Oleh:

Pembimbing Utama

DRA.EC.ERNA SULISTYOWATI, MM
NIP : 030 217 166

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

DR. SRI TRISNANINGSIH, MSI
NIP : 030 217 167

**PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF
ASSESSMENT DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)**

Yang diajukan

Ayu Ajeng Prastiwi
0713010239/FE/AK

Disetujui Untuk Lisan Oleh:

Pembimbing Utama

DRA.EC.ERNA SULISTYOWATI, MM
NIP : 19670204 199203 2001

Tanggal :

**Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Drs. Ec H. Rachman A. Suwaidi, Ms
NIP : 196003301986031003

USULAN PENELITIAN

**PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF
ASSESSMENT DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK**
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)

Yang diajukan

Ayu Ajeng Prastiwi
0713010239/FE/AK

Telah Diseminarkan dan Disetujui Untuk Menyusun Skripsi Oleh:

Pembimbing Utama

DRA.EC.ERNA SULISTYOWATI, MM
NIP : 19670204 199203 2001

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

DR. SRI TRISNANINGSIH, MSI
NIP : 1965092919922032001

SKRIPSI

PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)

Disusun Oleh :

AYU AJENG PRASTIWI
0713010239 / FE / EA

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh
Tim Penguji Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal : 29 Januari 2010**

**Pembimbing :
Pembimbing Utama**

**Tim Penguji :
Ketua**

Dra. Ec. Erna Sulistyowati, MM

Dr. Ec. Sri Hastuti, M.Si
Sekretaris

Drs. Ec. Sari Andayani, M.Aks
Anggota

Dra. Ec. Erna Sulistyowati, MM

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Dr. H. Dhani Ichsanuddin Nur, MM
NIP. 030 202 389

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Segala-galanya, sumber dari segala sumber, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. H. Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. EC. H. Rachman A. Suwaidi, MS, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra. EC. Erna Sulistyowati,MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr.Sri Trisnaningsih,SE.Msi, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jawa Timur.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jawa Timur, khususnya Program Studi Akuntansi yang telah memberi ilmu pengetahuan dan membimbing penulis selama masa kuliah.
7. Kedua Orangtua dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan restu, dukungan dan doanya selama penulis menempuh kuliah sampai dengan menyelesaikan Skripsi.
8. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesaikannya Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi pembaca, khususnya Program Studi Akuntansi.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Surabaya, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Fokus Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori	13

2.2.1. Pengertian Pajak	13
2.2.2. Kepatuhan Perpajakan.....	37
2.2.3. Teori yang Mendukung Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak	
Terhadap Penerimaan Pajak	38
2.2.4. Pengertian Pemeriksaan	39
2.2.4.1. Pemeriksaan Menurut Akuntansi.....	39
2.2.4.2. Pemeriksaan Menurut Ketentuan Perpajakan.....	41
2.2.4.2.1. Tujuan Pemeriksaan.....	41
2.2.4.2.2. Kebijakan Pemeriksaan di Bidang Pajak	42
2.2.4.2.3. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan	45
2.2.4.2.4. Kewajiban WP Apabila dilakukan Pemeriksaan	46
2.2.4.2.5. Hal Lainnya yang Perlu diketahui	46
2.2.4.2.6. Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Batasan Pemeriksaan ..	47
2.2.4.2.7. Mekanisme Pemeriksaan Pajak	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Lokasi Penelitian	51

3.3. Penentuan Informan	51
3.4. Sumber Data dan Jenis Data.....	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data	53
3.6. Analisis Data	54
3.7. Keabsahan Data.....	56

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Wilayah Administrasi.....	60
4.2. Pengelolaan SD Di KPP Pratama Pamekasan	64
4.3. Visi Misi KPP Pratama Pamekasan.....	66
4.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Pamekasan	68
4.5. Uraian Pelaksanaan Tugas Seksi Badan KPP Pratama Pamekasan	71
4.5.1 Sub Seksi Pengawasan Pembayaran masa PPh Badan	72
4.5.2 Sub Seksi Verifikasi PPh Badan	73
4.5.3 Sub Seksi Pengawasan Pembayaran masa pemotongan/pemungutan	73
4.5.4 Sub Seksi Verifikasi Pemotongan/Pemungutan.....	73
4.6. Pemeriksaan Pajak Di Seksi PPh Badan	74

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Hasil Penelitian	75
5.1.1. Ruang Lingkup dan Batasan Pemeriksaan Pajak.....	75
5.1.2. Dasar dan Kriteria Pemeriksaan Pajak	77
5.1.5. Pelaksana Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Pamekasan	78
5.2 Analisis dan Pembahasan	79
5.2.1. Pemeriksaan Pajak	79
5.2.2. Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self asesment.....	86
5.2.3. Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Tingkat Kepatuhan WP.....	94

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	97
6.2. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1. Perbandingan Luas Wilayah	63
3.2. Data Pegawai KPP Pratama Pamekasan	65
3.3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan	
Atas Pelaksanaan Sistem Self Adessmen.....	48
Gambar 2. Langkah-Langkah Pemeriksaan Pajak	84
Gambar 3. Prosedur Pemeriksaan	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

Lampiran 3 Bagan Organisasi KPP Pratama Pamekasan

Lampiran 4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 6 Batas Waktu Penyelesaian Laporan Pemeriksaan Pajak

Lampiran 7 Batas Waktu Penyelesaian Laporan Pemeriksaan Pajak

Lampiran 8 SURAT EDARAN DJP NOMOR SE-10/PJ.04/2008

Lampiran 9 Daftar Dokumentasi Foto Lapangan

**PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT DAN TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Oleh :

Ayu Ajeng Prastiwi

Abstraksi

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self asesment dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pemeriksaan di Kantor pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakanaksanaan Pemeriksaan Tahun 2008. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehubungan dengan telah diberlakukannya system self assessment sejak tahun 1983.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,observasi langsung dan studi pustaka.Analisa data dilakukan dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang ada dan peraturan yang berlaku.Perbandingan yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya subyektifitas penulis dalam melakukan intrepetasi data, namun dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang praktek pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan analisa yang dilakukan maka (1) kegiatan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, khususnya seksi PPh Badan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(2) Masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan diberlakukannya system self assesment sejak tahun 1983.(3) Meskipun Wajib Pajak belum mengisi SPT tahunan PPh pasal 25 dengan benar,tetapi untuk pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan sudah cukup tinggi.(4) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya dapat diketahui dari kegiatan pemeriksaan pajak.(5) Pemeriksaan pajak masih perlu terus digiatkan,karena selain untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.Pelaksanaan pemeriksaan hendaknya tidak mengabaikan hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak.

Kata Kunci: Sistem Self asesment, Pemeriksaan Pajak,dan Tingkat Kepatuhan WP.

**PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT DAN TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Oleh :

Ayu Ajeng Prastiwi

Abstraction

The problems studied in this thesis study is an examination of the tax as an act of supervision over the implementation of self assessment and systems and the level of taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the suitability of inspection activities in the Office of Tax Services Primary Pamekasan with article 29 of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law number 9 years 625/KMK.04 / 1994 dated December 27, 1994 as to which has been altered by the Minister of Finance 199/PMK.03/2007 number of Tax Inspection Procedures, and the Circular of the Director General of Tax Policy number SE-10/PJ.04/2008 of Investigation in 2008. Another purpose of this study was to determine the level of taxpayer compliance with respect to self-assessment system has been the enactment since 1983.

The research method used in this study is a case study. Data was collected through interviews, direct observation and literature study. Analysis of data is done by comparing the data have been obtained with existing theories and regulations. Comparisons are made referring to the theme of this research. The weakness of this thesis research is still a subjective writer in doing intrepetasi data, but from this study can be obtained picture of the practice examination in the Tax Office.

Based on the analysis carried out then (1) inspection activity in the Tax Office Primary Pamekasan, especially the Corporate Tax section has been in accordance with applicable regulations. (2) There are many taxpayers who have not implemented the tax liability in connection with the enforcement of self-assessment system since 1983. (3) Although the taxpayer did not enter the annual tax return Income Tax Article 25 properly, but for the implementation of the obligations of the tax administration is quite high. (4) The level of taxpayer compliance in implementing the obligations of taxation can only be known from the tax audit activities. (5) Tax audit still needs to be made to promote, because in addition to knowing the level of taxpayer compliance can also provide a substantial contribution to tax revenue. Implementation of the examination should not ignore the rights owned by Taxpayer.

Keywords: Self assessment and Systems, Tax Inspection, and Compliance Levels WP.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman kerajaan-kerajaan. Pada masa itu rakyat diwajibkan untuk menyerahkan upeti kepada raja yang besarnya sudah ditentukan. Pemungutan pajak atau upeti ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Bahkan setelah Indonesia merdeka pajak ditetapkan dan dipungut setiap tahun oleh pemerintah yang berkuasa.

Pada tahun 1980-an harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia mengalami kemerosotan dan situasi tidak menentu. Padahal struktur keuangan Indonesia banyak mengandalkan pemasukan/penerimaan dari sektor ini. Menyadari akan hal tersebut maka pemerintah mencari alternatif pengganti pemasukan negara dan pilihan tersebut jatuh pada Pajak. Kemudian disadari pula bahwa pranata hukum di sektor pajak banyak dibangun berdasarkan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang penyusunannya dilatarbelakangi oleh motif, dasar filosofi, konsep bernegara, dan struktur organisasi yang berbeda dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan. Oleh karena itu kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan langkah-langkah perombakan ketentuan perpajakan secara besar-besaran yang kemudian dikenal dengan *tax reform*, atau Pembaharuan Perpajakan Nasional I. Pembaharuan Perpajakan Nasional I ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan pada waktu itu, Radius Prawiro, di

depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ditujukan untuk lebih menegakkan kemandirian negara kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak dan gas alam. Sehingga sejak tahun 1984, sistem perpajakan mengalami reformasi dengan ditetapkannya beberapa Undang-undang Perpajakan. Sejak reformasi perpajakan itu diperkenalkan *Self Assessment System*, yaitu setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, melaporkan, dan memperhitungkan pajaknya sendiri. Sehingga aparat pajak hanya bertugas mengawasi, melayani dan memberikan informasi perpajakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Saat ini, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial. Undang-undang Pajak, sebagai bagian hukum suatu negara yang mengikat warga negaranya yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, dimana hukum pajak merupakan salah satu hukum khusus negara. Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional mempunyai 3 (tiga) sumber penerimaan pokok (berdasarkan data APBN-P 2009), yaitu: penerimaan dari sektor pajak sebesar 74,86%, penerimaan dari sektor bukan pajak (minyak dan gas alam, laba BUMN, PNBP lainnya) sebesar 25,03%, dan penerimaan dari sektor hibah sebesar 0,11%. Dari ketiga sumber yang tersebut di atas, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar penerimaan Negara. Hal ini dikarenakan sumber daya alam semakin lama semakin menipis dan tidak

dapat diperbaharui lagi, pinjaman/hutang menyebabkan adanya bunga yang sangat tinggi sehingga semakin membebani rakyat dalam jangka waktu lama, dan peran serta aktif rakyat membayar pajak untuk kemandirian membiayai pengeluaran negara sendiri.

Di Indonesia, otoritas pemegang kebijakan fiskal berada di Departemen Keuangan, dimana tugas dan wewenangnya dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pajak itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan dari lembaga yang mengelolanya, yaitu : 1) Pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai; 2) Pajak Daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.

Sektor penerimaan pajak pusat sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun anggaran terakhir sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor penerimaan yang lain. Tekad pemerintah dalam membudayakan pajak adalah menjadikan masyarakat sadar dan peduli pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak,

maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali. Faktor lain yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tingkat pendidikan dan layanan informasi perpajakan.

Sejak penerapan *self assessment system*, diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu syarat agar system perpajakan tersebut berhasil adalah adanya kemampuan masyarakat untuk dapat menghitung pajaknya sendiri. Adapun alat yang dipakai dalam perhitungan pajak adalah akuntansi. Di dalam undang-undang perpajakan tidak dikenal dengan istilah akuntansi, istilah yang senada dengan akuntansi adalah pembukuan. Pemahaman yang cukup atas pembukuan akan memudahkan Wajib Pajak dalam memperhitungkan pajaknya. Kepercayaan yang diberikan terhadap Wajib Pajak ini bisa saja disalahartikan dengan tindak penimpangan yang dapat dilakukan Wajib Pajak. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya aparat perpajakan berkewajiban untuk menegakkan hukum agar proses dan pelaksanaan system tersebut tetap ada aturannya.

Upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberikan kepercayaan melalui *self assessment* adalah dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menghasilkan pemeriksaan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu situasi dimana pemeriksaan dapat menjalankan tugas pemeriksaannya dengan baik dan dilain pihak Wajib Pajak merasa hak-haknya diperhatikan. Salah satu bentuk peran positif Wajib Pajak adalah sikap keterbukaan Wajib Pajak. Keterbukaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sesungguhnya.

Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tujuan utama pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Diliat dari penelitian yang terdahulu, banyak peneliti yang meneliti tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memang merupakan bahasan yang menarik, karena adanya pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Pemeriksaan pajak itu sendiri menyangkut banyak pihak didalamnya terutama Wajib Pajak itu sendiri. Suatu system yang telah ada secara teoritis serta peraturan perpajakan yang berlaku haruslah ada sesuai dengan aplikasi yang ada di lapangan, jika suatu system dilakukan dengan benar serta sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan. Karena dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan alat untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, penelitian di KPP Pratama Pamekasan karena Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan meliputi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Dengan 12.500 Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar mempunyai NPWP. Dari hasil wawancara peneliti, meskipun ada 12.500 Wajib Pajak ada sekitar 80% Wajib Pajak tergolong Wajib Pajak yang tidak Patuh mentaati peraturan perpajakan dalam memenuhi Kewajiban Wajib Pajaknya di KPP Pratama Pamekasan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah peneliti jabarkan, maka penelitian ini diberi dengan judul **“Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijaksanaan pemeriksaan di seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sehubungan dengan diterapkannya system self assessment sejak tahun 1983 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?

3. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada:

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan dan terbatasnya waktu yang tersedia bagi penulis maka penelitian ini membatasi pada masalah penerapan system self asesment atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pasal 25 yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan untuk pemeriksaan pajak tahun 2010, khususnya seksi PPh badan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara kegiatan pemeriksaan yang dilakukan seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sehubungan dengan telah diterapkan sistem self assessment sejak tahun 1983.
3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian mengenai analisa tingkat kesulitan pengisian SPT Masa dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah.
- b. Memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami, menganalisis permasalahan yang lebih dalam mengenai perpajakan.

2. Bagi Universitas

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya Fakultas Ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain. Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai Rujukan yang bermanfaat untuk memberikan pengenalan pengetahuan serta pemahaman kepada mahasiswa akan pentingnya mata kuliah perpajakan. Memberikan masukan sejauh mana kewajiban perpajakan yang dilaksanakannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan sejauh mana kewajiban perpajakan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

a. Dian Victor Pabuaran (2005)

Judul penelitian, “Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Batu”.

Permasalahan yang dibahas adalah “Apakah jumlah Wajib Pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan penagihan dengan surat paksa secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Batu?” dan “Apakah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan penagihan dengan surat paksa secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Batu?”.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah antara jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan penagihan dengan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak telah teruji kebenarannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan $F_{hit}(20,642) > F_{tabel}(3,298)$

b. Ekowati Wahyu Wulandari (2006)

Judul penelitian “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto”

Permasalahn yang dibahas, “Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) terhadap penerimaan pajak orang pribadi?” “Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial perilaku Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) terhadap penerimaan pajak orang pribadi?”.

Kesimpulan atas penelitian ii adalah terhadap pengaruh yang signifikan secara simultan perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) terhadap penerimaan pajak orang pribadi, terbukti. Dan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) terhadap penerimaan pajak orang pribadi, juga terbukti. Dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan perilaku wajib pajak (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y), dengan F_{hit} sebesar $50,618 > F_{tabel} (2,649)$ dan tingkat probabilitas $0,000 < 0,05$. Secara parsial perilaku Wajib Pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan t_{hit} sebesar $7,485 > t_{tabel} (1,960)$ dan tingkat probabilitas $0,000 < 0,05$, secara parsial pemeriksaan pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan t_{hit} sebesar $12,021 > t_{tabel} (-1,960)$ dan tingkat probabilitas $0,000 < 0,05$.

c. Riska Septiana (2007)

Dengan judul penelitian, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang sanksi, dan Pelayanan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Permasalahan yang dibahas adalah, “Apakah pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib ?”.

Kesimpulan atas penelitian ini adalah menyebutkan bahwa wajib pajak, persepsi Wajib Pajak tentang sanksi dan pelayanan pemerintah merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh.

d. Oktaviani Debby (2007)

Dengan judul penelitian, “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Madiun”.

Masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah kepatuhan Wajib Pajak dan jumlah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Madiun?”

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak secara serempak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

e. Henky Ariayudha (2009)

Judul penelitian, “Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan”.

Permasalahan yang dibahas adalah “Apakah jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di KPP Mojokerto?”

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah antara jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak telah teruji kebenarannya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan $F_{hit} (20,642) > F_{tabel} (3,298)$.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian pajak

1. Definisi dalam Perpajakan

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan yang meskipun berbeda-beda, tetapi berbagai definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama. Perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan pada sudut pandang yang digunakan masing-masing dalam perumusan pengertian pajak.

Beberapa definisi tentang pajak oleh para ahli adalah sebagai berikut :

a. Prof. PJA. Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini kemudian dikoreksi menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

c. Ray, Herschel, & Horace

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

d. Prof. Djayadiningrat

“Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, dalam undang-undang perpajakan tidak terdapat definisi/pengertian tentang pajak, namun peraturan perpajakan yang dikeluarkan pada tahun 2007 telah menyebutkan pengertian tentang pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Pembayar pajak (*tax payer*) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.

- d. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- e. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

Di samping karakteristik pajak, tentu terdapat juga unsur-unsur pajaknya. Unsur adalah elemen/hal-hal yang membentuk sesuatu sehingga menyebabkan sesuatu itu ada. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, unsur-unsur pajak antara lain:

- a. Ada masyarakat (kepentingan umum)

Masyarakat harus ada bagi timbulnya pajak. Hal tersebut dimengerti karena pajak diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Sementara itu kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing warga dipenuhi bukan dengan uang pajak.

- b. Ada undang-undang

Dengan adanya undang-undang telah tercermin adanya nilai demokrasi. Pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan juga rakyat melalui wakil-wakil mereka yang duduk di DPR. Melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat tersebut disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini rakyat dianggap telah

menyetujui adanya pajak tersebut karena telah menyetujuinya melalui wakil-wakil mereka di DPR.

c. Pemungut pajak – penguasa

Oleh karena pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau manerima pengalihan kekayaan itu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum, sekaligus sebagai penguasa, sehingga pemerintah pula yang berhak melakukan pemungutan.

d. Subjek pajak – wajib pajak

Subjek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Mereka ini berpotensi untuk dikenakan pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak. Adapun wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif juga memenuhi syarat objektif. Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan sebagainya. Sedangkan syarat objektif yakni syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak), misalnya seseorang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakannya pajak. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial

untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

e. Objek pajak – *tatbestand*

Untuk adanya pengenaan pajak tentu harus ada objeknya yakni sasaran yang akan dikenai pajak atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenakan pajak.

f. Surat ketetapan pajak

Pemberlakuan pajak terkadang memerlukan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau suatu badan. Wujudnya dapat bermacam-macam. Misalnya, dalam Pajak Bumi dan Bangunan dikenal SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan Surat Ketetapan Pajak, dalam Pajak Penghasilan dikenal SPT (Surat Pemberitahuan), dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua jenis pajak memerlukannya. Pajak-pajak tidak langsung, seperti bea materai, misalnya, tidak memerlukan adanya surat ketetapan pajak seperti itu.

Beberapa definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) sebagai berikut:

“Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara mengetahui. Jadi

pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu mengenai perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak”.

“Buku petunjuk adalah buku yang berisi ketentuan dan petunjuk praktis yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan”.

“Kesederhanaan adalah hal atau keadaan yang tidak banyak kesulitan. Jadi kesederhanaan formulir SPT Masa adalah lembar isian SPT Masa yang tidak banyak kesulitan dalam pengisiannya”.

“Peraturan adalah petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur”.

2. Jenis-jenis dan Fungsi Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu sebagai berikut:

a. Dari segi administratif yuridis

1) Segi yuridis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir. Sebagai contoh, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana pemungutannya menggunakan penetapan lewat SPT. Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental dan tidak menggunakan kohir. Contoh pajak

tidak langsung adalah Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2) Segi ekonomis

Suatu jenis pajak dikatakan pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan, di mana yang menjadi wajib pajak adalah yang membayar pajak atau memikul beban pajak. Adapun pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak di mana wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

b. Berdasarkan titik tolak pungutannya

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Jadi dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subjeknya (orang atau badan) baru kemudian dicari objeknya.
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Jadi dalam hal ini pertama harus dilihat objeknya, kemudian baru dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.

c. Berdasarkan sifatnya

- 1) Pajak yang bersifat pribadi/perorangan (*persoonlijk*) adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak, singkatnya kemampuan bayar atau daya pikul wajib pajak itu sendiri.
- 2) Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak.

d. Berdasarkan kewenangan pemungutannya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB), dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak ini antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi.

Terdapat beberapa fungsi pajak (Ilyas dan Burton, 2002), yaitu:

- a. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan

undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

- b. Fungsi regular, merupakan fungsi dimana pajak-pajakakan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dalam hal ini pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- c. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila dia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, apabila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
- d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo,2009), yaitu:

- a. Fungsi budgetair (anggaran), yaitu pajak alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke kas negara dan membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sejak 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan apabila melihat ke negara-negara lain, hampir semua

negara memasukkan dana dari masyarakat antara lain melalui pajak ini.

- b. Fungsi regulierend (mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi mengatur yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil.

Sementara itu, menurut Mar'ie Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
- c. Pajak merupakan alat redistribusi.

Jika dihubungkan dengan fungsi pajak yang telah diuraikan di depan, maka pajak sebagai instrumen penerimaan negara lebih menekankan pada fungsi budgeter, sedangkan pajak sebagai alat untuk mendorong investasi dan alat redistribusi lebih mengarah pada fungsi mengatur. Ketiganya masuk ke dalam dua fungsi yang disebutkan sebelumnya.

3. Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

- a. Subjek Pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. Undang-undang Pajak Penghasilan, misalnya, menyebutkan bahwa Subjek Pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, dan Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*).

Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk usaha tetap.

- b. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan dasar pengenaan pajak (objek pajak). Di dalam ketentuan, khususnya di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang pribadi

atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

c. Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1.28 UU KUP).

Wajib pajak dapat diwakili dalam hal:

- 1) Badan oleh pengurus.
- 2) Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator.
- 3) Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan.
- 4) Badan dalam likuidasi oleh likuidator.
- 5) Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
- 6) Anak yang belum dewasa oleh walinya.

d. Fiskus

Istilah fiskus (fiscus) berarti keranjang uang. Dalam perkembangan terkini, sering diartikan aparat pemerintah yang menangani pemasukan uang dari rakyat berupa pajak untuk dimasukkan ke kas negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fiskus dalam modernisasi perpajakan hanya bertugas sebagai petugas

pajak dalam hal melakukan pengawasan dan pemberian informasi perpajakan.

4. Sistem Pengenaan Pajak

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini peran fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas selaku wajib pajak. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan sehingga akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan/atau bangunan sebagai wajib pajak. Kiranya masih sulit mengharapkan masyarakat selaku wajib pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan memahami dan mampu menghitung pajak yang terutang sendiri.

b. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyeter, melaporkan, dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dalam sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Contoh dari sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat domisili, tempa usaha maupun tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Selain mendatangi Kantor Pelayana Pajak, wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration (e-reg)* di website Direktorat Jenderal

Pajak, yaitu www.pajak.go.id. Setelah melakukan pendaftaran dan memperoleh NPWP, wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk menghitung dan membayar pajak, dan selanjutnya melaporkan pajak terutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Sehingga di sini terdapat jaminan dan kepastian hukum terhadap data/informasi dari Wajib Pajak.

c. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Contoh dari sistem ini adalah Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21, di mana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang kepadanya disertai tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan kepada para pekerja/buruh/pegawai yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan/jasanya.

5. Pengertian, Jenis dan Fungsi SPT

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian SPT yaitu:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

b. Jenis SPT

Jenis SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

c. Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT bagi Wajib Pajak antara lain:

- 1) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.
- 3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan

lain dari suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian pula setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Salah satu fungsi NPWP adalah sebagai identitas wajib pajak, di samping menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Sejak diterbitkan NPWP bagi wajib pajak, maka secara hukum terdapat hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Hak yang bisa didapat oleh wajib pajak, yaitu:

- a. Hak membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Hak mengangsur dan menunda pembayaran.
- c. Hak mendapatkan pengembalian pajak (restitusi).
- d. Hak mengajukan gugatan, keberatan dan banding.
- e. Perlindungan terhadap rahasia wajib pajak.
- f. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak.
- g. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi.

Kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, yaitu:

- a. Kewajiban mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban membayar pajak.
- c. Kewajiban mengisi dan melaporkan SPT.
- d. Kewajiban membayar denda.
- e. Kewajiban melakukan pencatatan dan pembukuan.
- f. Kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan.

Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak, diwajibkan menggunakan sarana pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 rangkap, dan disetor melalui tempat pembayaran atas persetujuan Menteri Keuangan, yaitu Bank-bank persepsi dan kantor pos. Dalam hal melaporkan pajak yang terutang, sarana yang digunakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan

(SPT) dibedakan menjadi dua hal, yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu. Sementara SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Terdapat dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu: (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contohnya batas waktu pelaporan SPT Masa pada tanggal tertentu telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi undang-undang perpajakan yang berlaku. (2) Kepatuhan material adalah wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir (Nurmantu, 2003). Selain itu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka bisa dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka wajib pajak harus

bersikap aktif, dalam hal ini mengambil blanko SPT tersebut di tempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh wajib pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Kebenaran isi SPT sangat penting karena merupakan dasar penetapan utang pajak wajib pajak yang bersangkutan. Oleh Karena itu kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan WP Badan, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, dan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Lainnya. Di samping denda administrasi, wajib pajak juga dapat dikenakan denda pidana, misalnya:

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT; atau
- b. Wajib pajak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, didenda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 38 Undang-undang KUP).

- c. Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau
- d. Orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, atau
- e. Orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
- f. Orang yang dengan sengaja menolak pemeriksaan pajak, atau
- g. Orang yang dengan sengaja memperlihatkan pencatatan, pembukuan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
- h. Orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana paling lama 6 (enam) tahun (Pasal 39 ayat (1) Undang-undang KUP).

7. Pengertian Pajak Penghasilan

Dengan adanya pembaharuan system perpajakan nasional, maka sejak tanggal 1 Januari 1984 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku, terakhir diubah dengan Undang-Undang PPh No. 26/2008, kemudian disebut dengan UU PPh adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”(Direktorat Jendral Pajak, 2008)

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pension, badan, perusahaan, dan penyelenggara pemerintah.

b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

Merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

1. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lain.

c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 merupakan setoran pajak atas kekurangan bayar pajak dalam satu tahun pajak. Cara penghitungannya adalah sebesar pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan PPh dikurangi dengan pajak yang telah dipotong oleh pemungut pajak (PPh pasal 212, PPh pasal 22, PPh pasal 23) dan pajak yang dibayar di luar negeri (PPh pasal 24).

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)

2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
(PPh pasal 21, 22, 23, dan 24)

2.2.2 Kepatuhan Perpajakan

Ismawan (2001:82) yang dikutip dari Supadmi, Ni Luh (2005), mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut.

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen- elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen- elemen kunci (Ismawan, 2001:83) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.

- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua.

2.2.3 Teori yang Mendukung Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Teori kebangsaan, yang dijelaskan jika Wajib Pajak yang tergolong patuh bahwa dapat mencerminkan dalam diri jiwa Wajib Pajak telah tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kemaslatan hidup manusia (Hutagaol, 2006). Berdasarkan teori kepatuhan yang diungkapkan oleh Devano, Sony (2006), jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, maka efeknya penerimaan pajak bertambah besar. Artinya apabila Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh, maka semakin patuhnya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT dan membayar pajaknya tepat waktu, membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka akan bisa memberikan kontribusi penerimaan pajak bisa meningkat. Dikarenakan Wajib Pajak melakukan kepatuhan dalam membayar pajak yang timbul sebagai respon atas pelayanan prima yang dilakukan oleh kantor

pajak (Dawam, 2006). Wajib pajak yang aktif dan terdaftar yang membayar pajak secara sukarela menunjukkan akan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya Wajib Pajak Patuh yang aktif dan sudah terdaftar secara sukarela bisa memberikan contoh dan sikap bagi Wajib Pajak yang lain yang belum terdaftar, agar bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar dengan sukarela mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Dengan bertambahnya wajib pajak baru, merupakan tambahan yang bisa meningkatkan penerimaan pajak, target penerimaan pajak juga bisa terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.2.4 Pengertian Pemeriksaan

2.2.4.1 Pemeriksaan Menurut Akuntansi

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa.

Menurut Mulyadi (2002 ; 40) , definisi pemeriksaan adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengvaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Oleh karena itu,

pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan sedangkan pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Suatu pengawasan akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila keseluruhan tindak lanjut itu dilaksanakan, maka keseluruhan pekerjaan tersebut merupakan pengendalian. Akan tetapi bilamana tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan.

Dalam akuntansi, pemeriksaan lebih dikenal dengan istilah auditing. Auditing merupakan salah satu bidang akuntansi yang membahas tentang prinsip, prosedur dan metoda perolehan dan penelitian bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan. Tujuannya adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran atas kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

Pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut menurut Sukrisno Agoes (1996:1).

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen

untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan menurut Arens Loebbecke (1996:1).

Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses secara sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.2.4.2 Pemeriksaan Menurut Ketentuan Perpajakan

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4.2.1 Tujuan Pemeriksaan

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi.
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
 - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf.

- e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf

2. Tujuan lain, yaitu:

- a. Pemberian NPWP (secara jabatan)
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil .
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN

2.2.4.2.2 Kebijakan Pemeriksaan di Bidang Pajak

Pemerintah, dalam hal ini direktorat Jenderal Pajak, mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE 10/PJ.7/2004 tanggal 31 desember 2004 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para Kepala Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap

pelaksanaan pemeriksaan pajak serta memberikan kepastian hukum, pelayanan, dan pembinaan kepatuhan perpajakan kepada Wajib Pajak.

Jenis-jenis pemeriksaan terdiri dari :

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan Rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan Lebih Bayar.
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan, yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak dari suatu KPP ke KPP lain
4. Wajib Pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Pemeriksaan kriteria seleksi

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dipilih berdasarkan skor risiko kepatuhan.

1. Pemeriksaan kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih diperiksa berdasarkan system penilaian (*scoring*) secara komputerisasi.

c. Pemeriksaan Khusus

Yaitu, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan, atau pengaduan mengenai kemungkinan terjadinya penyimpangan pajak, serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk karena Wajib Pajak.

1. Terdapat dugaan terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan
2. Diterimanya pengaduan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui kotak Pos 5000.
3. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
4. Terdapat permintaan dari Wajib Pajak.

5. Adanya pertimbangan tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak.
 6. Terdapat kebutuhan untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis atas data, informasi, atau laporan pemeriksaan pajak.

2.2.4.2.3 Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

1. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak

6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu.

2.2.4.2.3 Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

2. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
3. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Memberi keterangan yang diperlukan.

2.2.4.2.4 Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui

1. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok Pemeriksa.
2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

3. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.

2.2.4.2.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Dan Batasan Pemeriksaan

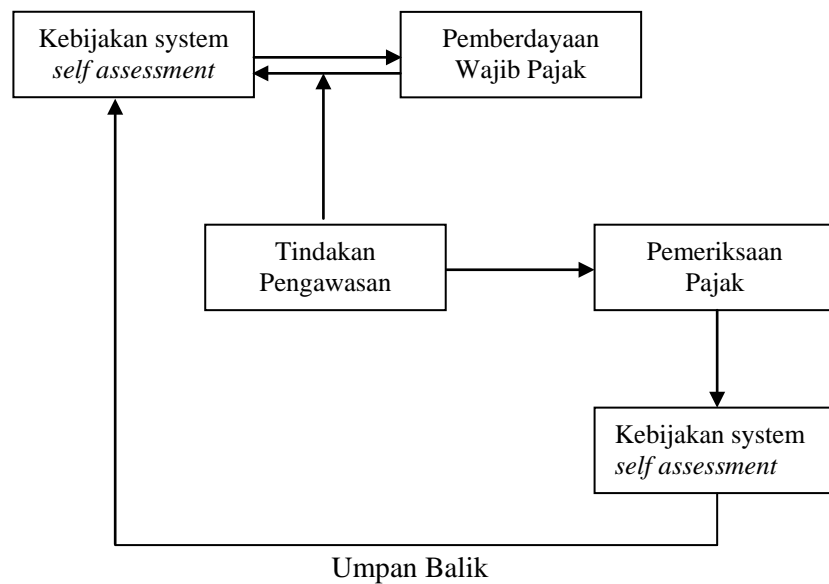
Kebijakan pemeriksaan pasca diberlakukannya peraturan perundangan perpajakan yang baru umumnya sama dengan kebijakan yang berlaku sebelumnya. Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan melalui tata cara pemeriksaan dan penentuan sasaran Wajib Pajak yang akan diperiksa. Tata cara pemeriksaan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2.2.4.2.6 Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan

Kerangka pemikiran tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap system self assessment, merupakan manifestasi dari adanya upaya pemberdayaan terhadap Wajib Pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan, secara sederhana digambarkan sebagai berikut :

Mekanisme Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment

Gambar 1.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metoda studi kasus. Qualitatif research adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Krik dan Miller (1986), yang dikutip dari Moleong (2002) penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut menurut bahasa dan peristilahannya. Penelitian kualitatif bertujuan mengumpulkan data dalam setting alamiah, yang akan digunakan untuk menyusun teori melalui analisis data secara induktif.

Berdasarkan tujuan penelitian, metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Efferin, dkk (2004) penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang detail-detail sebuah situasi, lingkungan sosial, atau hubungan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang menekankan pada deskripsi yang terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.

Menurut Bogdan, Taylor (1975) metode kualitatif menunjuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan ini mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu, tidak akan direduksi (disederhanakan) kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesa yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi dilihat sebagai bagian dari suatu yang utuh.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek alamiah, atau natural setting, sehingga metode ini sering disebut metode naturalistik. Sugiyono (2005)

Menurut Yuhertiana, Indrawati (2009), dari berbagai definisi tentang penelitian kualitatif menyimpulkan diperoleh beberapa kata kunci yaitu :

1. Tidak menggunakan analisis statistik atau kuantitatif
2. Data bersifat deskriptif berupa tulisan yang mencatat ungkapan lisan atau perilaku manusia
3. Setting alamiah, mengamati manusia menurut dirinya sendiri
4. Analisis data secara induktif
5. Bertujuan untuk menemukan teori

6. Realita tidak hanya yang tampak terlihat tetapi yang lebih penting apa makna dibalik realita empiris tadi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yaitu dengan objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Dalam penelitian ini peneliti akan membuat study tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan system self assessment dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.3 Penentuan Informan

Penentuan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiono (2005), Snowball sampling adalah penentuan sumber data, pada proposal masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti dilapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

Informan yang dipilih sebagai kata kunci dari informasi adalah Ibu Mariyani Lestari sebagai Seksi Waskon I, Bapak Slamet Pawiono sebagai Seksi Waskon II, serta Bapak Abdul Nadjid sebagai Seksi Pemeriksaan. Selanjutnya diteruskan kepada informan-informan lain yang

direkomendasikan oleh informan kunci serta informan yang oleh peneliti dianggap berhubungan langsung dalam pemeriksaan serta kepatuhan Wajib Pajak.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Menurut Yuhertiana, Indrawati (2009), data dalam penelitian kualitatif adalah catatan-catatan yang sifatnya deskriptif. Peneliti perlu mengumpulkan semua hal terkait dengan permasalahannya yang dimunculkan oleh individu yang diteliti. Penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan narasi dalam transkripsi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar,foto).

Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen internal berupa laporan data kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan, berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Pengertian data primer menurut Rosady, Ruslan (2003:138) adalah data yang dipergunakan secara langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder apabila dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Survey Pendahuluan

Tahap ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi kantor pelayanan pajak pertama untuk mendapatkan data-data mengenai gambaran umum organisasi, dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam organisasi untuk diteliti lebih lanjut.

2. Study Kepustakaan

Berupa kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur dan buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori yang relevan dengan permasalahan guna memecahkan masalah.

3. Survey Lapangan

Yaitu kegiatan penelitian langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan beberapa teknik :

- a. Observasi, di mana dilakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung berbagai kegiatan.
- b. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pemeriksaan pajak serta dengan kepatuhan wajib pajak. Wawancara bertujuan untuk mencari dan menggali informasi berupa pandangan atau pendapat obyek penelitian.

c. Dokumentasi, Metode atau teknik documenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang (Bogdan, 1993), yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.

d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Jadi peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan (Sugiyono, 2005), namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredible. Miles and Huberman (1984) yang dikutip dari Sugiyono (2005), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain :

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Humberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verivication*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausul atau interaktif, hipotesis, atau teori.

3.7 Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atas kebenaran dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut dengan keabsahan data (Sugiyono, 2005:117-127) :

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji *credibility* atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi.

a. Perpanjangan keikutsertaan

Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Keikutsertaan peneliti dalam melakukan penelitian ini memerlukan periode selama 2 bulan, dimulai pada bulan Mei sampai Juni.

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk report, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelengkapan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direka secara pasti dan sistematis. Dalam peningkatan ketekunan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Peneliti untuk meningkatkan ketekunan memerlukan periode selama tiga minggu untuk menekuni suatu pengamatan. Demikian juga dengan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data sumber dengan berbagai cara, dan bergai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas ekstrenal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistic, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “Validitas eksternal” ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi transferabilitas.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data.

Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan *dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *konfirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 WILAYAH ADMINISTRASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan ini pada mulanya adalah Kantor Pelayanan Pajak saja yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1992 yang wilayah kerjanya hanya Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan diresmikan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada tanggal 2 Oktober 2008 yang wilayah kerjanya menjadi 2 wilayah Kabupaten.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan meliputi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan secara geografis terletak di tengah-tengah pulau Madura yang memanjang dari barat ke timur. Sedangkan Kabupaten Sumenep terletak di bagian timur pulau. Wilayah Kabupaten Sumenep banyak terdiri dari pulau pulau kecil yang letaknya cukup jauh. Sebagai wilayah yang terletak di kawasan laut atau pantai, iklim di wilayah kedua kabupaten tersebut cukup panas dan lebih banyak musim kemarau dibandingkan dengan musim hujan. Kondisi cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di kedua wilayah kabupaten tersebut. Baik dari kondisi ekonomi, sosial maupun budaya. Secara ekonomi sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan berprofesi

sebagai petani dan nelayan. Selebihnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan sedikit pedagang. Sedangkan dari kondisi sosial, masyarakat di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan merupakan masyarakat Agamis yang sebagian besar beragama Islam. Dan dari segi budaya, karena masyarakatnya sebagian besar beragama Islam maka budaya di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam. Hal ini terbukti dengan banyaknya Pondok Pesantren di wilayah kedua kabupaten.

Kebudayaan dari pesantren sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari masyarakat di Pulau Madura khususnya Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Seperti telah disebutkan diatas bahwa Kondisi iklim dari wilayah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan yang dibanyak dipengaruhi oleh musim kemarau dan letak geografis yang berada dipesisir pantai, mata pencaharian masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Dari pertanian sebagian besar masyarakat menanam tembakau. Selain tembakau juga menghasilkan cabe jamu dan padi. Namun dari pertanian tersebut yang dapat mengangkat taraf hidup masyarakat dikedua kabupaten adalah tembakau. Adapun pembagian wilayah administrasi menurut wilayah kecamatan adalah :

A. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan dan 192 Desa

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Kecamatan Tlanakan | terdiri dari 17 Desa |
| 2. Kecamatan Pademawu | terdiri dari 22 Desa |
| 3. Kecamatan Galis | terdiri dari 10 Desa |
| 4. Kecamatan Larangan | terdiri dari 14 Desa |
| 5. Kecamatan Pamekasan | terdiri dari 18 Desa |
| 6. Kecamatan Proppo | terdiri dari 27 Desa |

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 7. Kecamatan Palengan | terdiri dari 15 Desa |
| 8. Kecamatan Pegantenan | terdiri dari 13 Desa |
| 9. Kecamatan Pakong | terdiri dari 10 Desa |
| 10. Kecamatan Kadur | terdiri dari 12 Desa |
| 11. Kecamatan Waru | terdiri dari 12 Desa |
| 12. Kecamatan Pasean | terdiri dari 9 Desa |
| 13. Kecamatan Batu Marmar | terdiri dari 13 Desa |

B. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan dan 348 Desa

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Kecamatan Pragaan | terdiri dari 14 Desa |
| 2. Kecamatan Bluto | terdiri dari 20 Desa |
| 3. Kecamatan Saronggi | terdiri dari 14 Desa |
| 4. Kecamatan Giligenteng | terdiri dari 8 Desa |
| 5. Kecamatan Talongo | terdiri dari 8 Desa |
| 6. Kecamatan Kalianget | terdiri dari 7 Desa |
| 7. Kecamatan Kota Sumenep | terdiri dari 23 Desa |
| 8. Kecamatan Lenteng | terdiri dari 20 Desa |
| 9. Kecamatan Pasongsongan | terdiri dari 10 Desa |
| 10. Kecamatan Ganding | terdiri dari 14 Desa |
| 11. Kecamatan Guluk Guluk | terdiri dari 12 Desa |
| 12. Kecamatan Ambunten | terdiri dari 15 Desa |
| 13. Kecamatan Rubau | terdiri dari 11 Desa |
| 14. Kecamatan Dasuk | terdiri dari 15 Desa |
| 15. Kecamatan Manding | terdiri dari 11 Desa |

16. Kecamatan Batu Putih	terdiri dari 14 Desa
17. Kecamatan Gapura	terdiri dari 17 Desa
18. Kecamatan Batang-batang	terdiri dari 16 Desa
19. Kecamatan Dungkek	terdiri dari 15 Desa
20. Kecamatan Nungunong	terdiri dari 8 Desa
21. Kecamatan Gayam	terdiri dari 10 Desa
22. Kecamatan Raas	terdiri dari 9 Desa
23. Kecamatan Sapeken	terdiri dari 9 Desa
24. Kecamatan Arjasa	terdiri dari 28 Desa
25. Kecamatan Masa Lembu	terdiri dari 4 Desa
26. Kecamatan Batuan	terdiri dari 7 Desa
27. Kangayan	terdiri dari 9 Desa

PERBANDINGAN LUAS WILAYAH

Table 4.1

No	Wilayah	Luas Wilayah (ha)
1	2	3
1	Kabupaten Pamekasan	79.230
2	Kabupaten Sumenep	199.854
Jumlah		279.084

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa Wilayah Kabupaten Sumenep lebih luas dibandingkan dengan Kabupaten Pamekasan.

4.2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI KPP PRATAMA PAMEKASAN

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan meliputi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan secara geografis terletak di tengah-tengah pulau Madura yang memanjang dari barat ke timur. Sedangkan Kabupaten Sumenep terletak di bagian timur pulau. Wilayah Kabupaten Sumenep banyak terdiri dari pulau pulau kecil yang letaknya cukup jauh. Sebagai wilayah yang terletak di kawasan laut atau pantai, iklim di wilayah kedua kabupaten tersebut cukup panas dan lebih banyak musim kemarau dibandingkan dengan musim hujan. Kondisi cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di kedua wilayah kabupaten tersebut. Baik dari kondisi ekonomi, sosial maupun budaya. Secara ekonomi sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Selebihnya adalah Pegawai Negeri Sipil, menjadi tenaga kerja di Malaysiaa dan sedikit pedagang. Sedangkan dari kondisi sosial, masyarakat di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan banyak terdapat Pondok Pesantren di wilayah kedua kabupaten.

KPP Pratama Pamekasan memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2009 adalah 67 orang. Berikut disajikan data pegawai KPP Pratama Pamekasan berdasarkan klasifikasi golongan dan pendidikan.

Data Pegawai KPP Pratama Pamekasan Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	30	3	33
3	Golongan III	26	7	33
4	Golongan IV	1	-	1
	Total	57	10	67

Data Pegawai KPP Pratama Pamekasan Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	SD	1	0	1
2	SMP	0	0	0
3	SMA	8	10	18
4	D I	12	0	12
5	D III	17	0	17
6	D IV / S I	14	0	14
7	S 2	5	0	5
	Total	57	10	67

Table 4.2

Dari data tersebut pegawai yang berpendidikan sarjana sebanyak 20,89% dan pegawai yang berpendidikan D III dan D I sebanyak 43,28% sedangkan yang berpendidikan smp dan sma sebanyak 14,83%.

4.3 VISI MISI KPP PRATAMA PAMEKASAN

Tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah melaksanakan pemungutan pajak-pajak negara di wilayah wewenangnya sesuai kebijaksanaan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun dan memelihara administrasi mengenai obyek dan subyek perpajakan yang berada di wilayah lingkungannya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pemungutan pajak-pajak negara di daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang diterapkan oleh instansi di atasnya.
3. Melaksanakan penerangan perpajakan kepada khalayak di daerah wewenangnya.
4. Membina semua unsure dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan tugas dan pemungutan pajak yang menjadi wewenangnya.
5. Mengamankan segala sesuatu yang menyangkut semua tugas tersebut di atas.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan pernyataan visi dan misinya yang resmi berlaku bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Alasan dikeluarkan pernyataan visi dan misi ini adalah berkembangnya kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia yang telah memunculkan paradigma-paradigma baru di berbagai bidang yang sangat berbeda dengan paradigma-paradigma lama. Dalam

kondisi yang demikian, sikap dan cara kerja Direktorat Jenderal Pajak juga harus mengalami perubahan-perubahan selaras dengan perubahan kondisi lingkungan dan tuntutan masyarakat. Tanpa perubahan sikap, moral dan peningkatan kualitas kerja dan kinerjanya, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak akan dapat memenuhi harapan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Tuntutan akan akuntabilitas instansi pemerintah semakin meningkat sejalan dengan dampak krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan ini maka Pertama diperlukan kesatuan pandangan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, termasuk kantor pelayanan pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Direktorat Jenderal Pajak harus menuju. Oleh karena itu pernyataan visi, misi dan strategi sangat diperlukan untuk membangkitkan komitmen dan kesatuan gerak bagi seluruh jajaran.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan yang Modern yang efektif, Efisien, dan Dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan Profesionalisme yang Tinggi. Sedangkan misi Direktorat Jenderal Pajak terbagi menjadi 4, yaitu :

1. Misi Fiscal

Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

2. Misi Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang

menghindarkan kebijaksanaan perpajakan yang bersifat distorsi terhadap perekonomian.

3. Misi Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa, sehingga hak-hak masyarakat dihormati.

4. Misi Kelembagaan

Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Dengan pernyataan visi dan misi ini diharapkan Kantor Pelayanan Pajak selaku instansi pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak dapat menjalankan peran dan tugasnya masing-masing dengan baik.

4.4 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAMEKASAN

Struktur organisasi adalah rangka yang mewujudkan segenap tugas pekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan terdiri 7 (tujuh) seksi, yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi), 1 (satu) Sub Bagasan, yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan 2 (dua) Kantor Penyuluhan Pajak yang dipimpin seorang kepala kantor penyuluhan pajak. Masing-masing seksi/sebagian diuraikan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha terdiri atas tiga sub seksi / urusan, yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala urusan (kaur), yaitu meliputi :

- a. Urusan tata usaha kepegawaian
- b. Urusan keuangan
- c. Urusan rumah tangga

2. Kantor Penyuluhan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan mempunyai dua kantor penyuluhan pajak, yaitu yang berlokasi di klaten dan di kabupaten sukoharjo.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai kegiatan melakukan pengolahan data perpajakan untuk disajikan ke seluruh seksi melalui perangkat computer. Seksi ini mempunyai tiga sub sesi yaitu ;

- a. Sub seksi data masukan dan keluaran
- b. Sub seksi pengolahan data dan penyajian informasi
- c. Sub seksi penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak

4. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi tata usaha perpajakan terdiri atas tiga sub, yaitu :

- a. Sub seksi pendaftaran wajib pajak
- b. Sub seksi surat pemberitahuan pajak (SPT)
- c. Sub seksi penggalian potensi paja dan ekstensifikasi wajib pajak

5. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seksi PPh orang pribadi mempunyai tugas pokok melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, melakukan pengawasan atas surat pemberitahuan masa dan pemeriksaan sederhana atas SPT tahunan PPh

orang pribadi, serta wajib pajak yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seksi PPh orang pribadi terbagi atas dua subseksi yaitu :

- a. Sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh orang pribadi
- b. Sub seksi verifikasi PPh orang pribadi

6. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Seksi PPh badan terbagi atas empat subseksi yaitu :

- a. Sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh badan
- b. Sub seksi verifikasi PPh badan
- c. Sub seksi pengawasan pembayaran masa pemotongan & pemungutan PPh
- d. Sub seksi verifikasi PPh pemotongan dan pemungutan pajak

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Seksi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tidak langsung lainnya (PTLL) terbagi atas empat subseksi yaitu :

- a. Subseksi PPN industry yang menangani urusan PPN untuk sector usaha di bidang industri
- b. Subseksi PPN perdagangan menangani urusan PPN untuk jenis usaha perdagangan
- c. Subseksi PPN jasa dan PTLL yang menangani urusan pajak pertambahan nilai untuk jenis usaha di bidang jasa dan menangani pajak tidak langsung lainnya.

- d. Subseksi vertifikasi PPN dan PTLL, menangani urusan vertifikasi atau pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak

8. Seksi penerimaan dan keberatan

Seksi penerimaan dan keberatan mempunyai tugas pokok piñatausahaan penerimaan pajak dan penyelesaian masalah keberatan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Seksi ini terdiri atas empat subseksi, yaitu :

- a. Subseksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Subseksi Rekonsiliasi.
- b. Subseksi Keberatan Pajak Penghasilan.
- c. Subseksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan PTLL

9. Seksi penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas pokok melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan melaksanakan proses tindakan penagihan pajak, yang terdiri dari dua subseksi yaitu :

- a. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak
- b. Subseksi Penagihan

4.5 URAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEKSI BADAN KPP PRATAMA

PAMEKASAN

- a. Pengelolaan Surat Setoran (SSP) PPh Badan baik lembar ketiga yang diterima dari wajib pajak maupun lembar kedua yang diterima dari Seksi Penerimaan dan Keberatan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PPh baik mengenai pembayaran angsuran PPh maupun pelaporan SSP.

- c. Membuat laporan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 terhadap wajib pajak.
- d. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Badan.

Seksi PPh Badan mempunyai tugas pokok melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SSP, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, melakukan pengawasan atas SSP dan pemeriksaan sederhana atas SPT Tahunan PPh Badan dan PPh 21, serta Wajib Pajak yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

Seperti telah dikemukakan di muka seksi PPh badan ini terdiri dari 4 (empat) subseksi, berikut ini diuraikan tugas pokok masing-masing subseksi.

4.5.1 SUB SEKSI PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PPH BADAN

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh subseksi ini adalah :

- a. Pengolahan SSP baik lembar yang diterima dari wajib pajak maupun lembar kedua yang diterima dari Seksi Penerimaan dan Keberatan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PPh Badan baik mengenai pembayaran angsuran PPh maupun pelaporan SSP.
- c. Membuat laporan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 terhadap wajib pajak 100 besar.
- d. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 badan.

4.5.2 SUB SEKSI VERIFIKASI PPH BADAN

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh subseksi ini adalah :

- a. Melakukan penelitian formal terhadap laporan SPT Tahun PPh Badan yang masuk.
- b. Melakukan pemeriksaan material terhadap laporan SPT Tahunan PPh pasal 25, dengan melakukan pemeriksaan sederhana lapangan.

4.5.3 SUB SEKSI PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh subseksi ini adalah :

- a. Pegolahan SPT Masa PPh Pasal 21/22/23/26 dan SSP baik lembar ketiga yang diterima dari Wajib Pajak maupun lembar kedua yang diterima dari Seksi Penerimaan dan Keberatan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PPh Pasal 21/22/23/26 baik mengenai pembayaran angsuran PPh maupun pelaporan SPT Masa PPh.
- c. Membuat laporan pengawasan pembayaran PPh Pasal 21 terhadap wajib pajak 100 besar.

4.5.4 SUB SEKSI VERIFIKASI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah :

- a. Melakukan penelitian formal terhadap laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang masuk.

- b. Melakukan pemeriksaan material terhadap laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21, baik dengan pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan.

4.6 PEMERIKSAAN PAJAK DI SEKSI PPh BADAN

Pemeriksaan Pajak di seksi PPh badan KPP Pratama Pamekasan dilaksanakan di bawah sub seksi verifikasi PPh badan dan verifikasi pemotongan/pemungutan. Setiap pemeriksaan dilaksanakan dalam suatu tim pemeriksaan, yang diketuai seorang pejabat eselon V ke atas. Pemeriksaan pajak ini meliputi pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pasal 25 dan SPT Tahunan PPh pasal 21. Pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Untuk pemeriksaan SPT Tahunan pasal 25 melalui PSL, sedangkan untuk SPT Tahunan PPh pasal 21 melalui PSK. Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, penelitian ini hanya dilakukan atas pemeriksaan SPT Tahunan PPh pasal 25.

Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa selama tahun 2010 adalah 27 Wajib Pajak.

Kriteria pemeriksaan atas Wajib Pajak ini adalah :

- a. 13 Wajib Pajak, merupakan Wajib Pajak yang SPT Tahunan PPh pasal 25-nya lebih bayar.
- b. 11 Wajib Pajak, merupakan Wajib Pajak yang diperiksa karena adanya usulan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.
- c. 3 Wajib Pajak, merupakan Wajib Pajak yang diperiksa karena usulan Wajib Pajak untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas data-data yang diperoleh selama penelitian. Seluruh data dianalisis berdasarkan landasan teori dan peraturan yang berlaku. Alat analisis utama yang digunakan adalah pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang no 28 tahun 2007, Keputusan Menteri Keuangan nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak serta Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE - 10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan tahun 2008.

5.1 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

5.1.1 RUANG LINGKUP DAN BATASAN PEMERIKSAAN PAJAK

Kebijakan pemeriksaan pasca diberlakukannya peraturan perundangan perpajakan yang baru umumnya sama dengan kebijakan yang berlaku sebelumnya. Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan melalui tatacara pemeriksaan dan penentuan sasaran Wajib Pajak yang akan diperiksa. Tata cara pemeriksaan telah diatur dalam Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007. Dalam ketentuan

tersebut telah diatur tentang ketentuan umum, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu dalam pelaksanaan pemeriksaan di setiap Kantor Pelayanan Pajak juga mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE - 10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan tahun 2008. Ruang lingkup pemeriksaan telah diklasifikasikan menjadi pemeriksaan lengkap dan sederhana, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lengkap yang dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak dan /atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
2. Pemeriksaan sederhana, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk jenis-jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan di lapangan dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

Terdapat jangka waktu pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
2. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor dihitung sejak tanggal Wajib Pajak harus datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Jangka Waktu Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
4. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.

Unit pelaksana Pemeriksaan Lengkap adalah Direktorat Jenderal Pajak, kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak (Karikpa), sedangkan Unit Pelaksana pemeriksaan Sederhana adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

5.1.2 DASAR DAN KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum. dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007, sedangkan tata cara pemeriksaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan nomor 199/PMK.03/2007 .

Tujuan pemeriksaan menurut Keputusan Menteri Keuangan. Republik Indonesia nomor 199/PMK.03/2007 adalah :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah pemeriksaan yang pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh/mengumpulkan bahan-bahan yang dapat dijadikan dasar untuk meng-uji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajaknya termasuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

5.1.3 PELAKSANA PEMERIKSA PAJAK DI KPP PRATAMA PAMEKASAN

Sesuai dengan Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan pajak dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki keahlian sebagai pemeriksa pajak. Begitupun di KPP Pratama Pamekasan PNS yang bertugas di pemeriksaan pajak telah memiliki keahlian. Keahlian tersebut harus didapat melalui pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya petugas pajak harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan obyektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selain itu,

pemeriksa pajak bisa merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan diberi wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagai pemeriksa pajak.

Tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak adalah pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Itjen Depkeu), pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Tugas dan unit kerja para pemeriksa pajak di KPP Pratama Pamekasan telah ditentukan. Tenaga pemeriksa yang merupakan tenaga fungsional pemeriksa pajak bertugas melakukan pemeriksaan, lengkap. Unit kerja dimana mereka bergabung dapat di Kantor, Pusat Direktorat Pemeriksaan Pajak, di Kantor Wilayah, dan terutama di Kantor Perneriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Sedangkan tenaga pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan melaksanakan pemeriksaan sederhana, baik pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) maupun pemeriksaan sederhana kantor (PSK)

5.2 ANALISIS dan PEMBAHASAN

5.2.1 PEMERIKSAAN PAJAK

Berdasarkan definisi pemeriksaan menurut ketentuan perpajakan, dan pemeriksaan/auditing menurut akuntansi, maka pemeriksaan pajak dengan pemeriksaan/auditing merupakan kegiatan yang sama. Keduanya meliputi proses yang sistematis, merupakan kegiatan perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti secara objektif untuk mengetahui kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan tujuannya berbeda, bila auditing menurut akuntansi untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan yaitu prinsip akuntansi yang berlaku

umum (PABU), maka tujuan pemeriksaan pajak pada dasarnya adalah untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Berikut Pemaparan dari Bapak Nadjib Seksi pemeriksaan :

Iya, memang pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan WP bukan untuk menghasilkan/mencari laba, seperti halnya pemeriksaan akuntansi. menguji kepatuhan disini adalah mencari WP yang tidak patuh serta menindak lanjutinya.

Untuk mengetahui kegiatan pemeriksaan di seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penelitian ini akan mengacu pada:

1. Pelaksanaan pemeriksaan

Salah satu pengaruh kualitas hasil pemeriksaan adalah kemampuan yang dimiliki tenaga pemeriksa atau sumber daya manusia yang dimiliki di jajaran Departemen Keuangan. Kemampuan pemeriksa seperti telah disyaratkan pada Pedoman Umum Pemeriksaan, menyatakan bahwa pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup, yang dapat menggunakan tenaga keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa. Semakin pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan semakin tingginya kemampuan tenaga pemeriksa yang dibutuhkan, baik mengenai seluk beluk dunia usaha, sifat transaksi yang semakin kompleks maupun tentang aspek yuridis fiskalnya.

Pelaksana pemeriksa di seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan merupakan tenaga pemeriksa yang telah mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan, baik itu dari sekolah kedinasan,

maupun lulusan pendidikan dan latihan khusus pajak. Sehingga telah sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Terbukti dari dokumen internal pengelolaan sumber daya di KPP Pratama Pamekasan, yang menyatakan Dari data tersebut pegawai yang berpendidikan sarjana sebanyak 20,89% dan pegawai yang berpendidikan D III dan D I sebanyak 43,28% sedangkan yang berpendidikan smp dan sma sebanyak 14,83%.

2. Jenis pemeriksaan

Pemeriksaan pajak di seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan meliputi pemeriksaan SPT Tahunan PPh pasal 25 dan SPT Tahunan PPh pasal 21. Untuk penelitian ini hanya dibahas pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh pasal 25. Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa selama tahun 2010 adalah 27 Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 24 Wajib Pajak, merupakan merupakan Wajib Pajak yang SPT Tahunan PPh pasal 25-nya lebih bayar, yaitu SPT dengan jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
- b. 10 Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang diperiksa karena adanya usulan dari Knator Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Usulan ini dilakukan karena adanya indikasi Wajib Pajak melakukan penyimpangan atas ketentuan perpajakan. Sebelum melakukan pemeriksaan, KPP Pratama Pamekasan harus mendapat ijin dari Kanwil DJP II Jawa Timur.

- c. 3 Wajib Pajak, merupakan Wajib Pajak yang diperiksa usulan Wajib pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut kutipan dari hasil wawancara :

Selama ini penerapan tata cara pemeriksaan sesuai dg peraturan dari menteri keuangan nomor 199/PMK.03/2007 itu, karna pemeriksaan itu sangat sensitive perlakuannya, kalau tidak seseuai dg peraturan kita yang akan dikenakan sanksi dari DJP.sesuai dengan peraturan nomor 199/PMK.03/2007 jadi kita tidak bisa semena-mena melakukan pemeriksaan.(Bapak Agus seksi fungsional)

Kebijaksanaan pemeriksaan itu telah diatur dalam surat edaran Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-04/PJ.7/2000 tanggal 12 April 2000 kemudian Nomor SE - 10/PJ.04/2008.(Bapak Nadjib seksi pemeriksaan)

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, maka pemerikasaan atas Wajib Pajak telah memenuhi kriteria seperti yang telah tercantum dalam ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemerikasaan Pajak, serta surat sedaran direktur jenderal pajak nomor SE-04/PJ.7/2000 tanggal 12 April 2000 tentang Kebijaksanaan Pemerikasaan Tahun 2000.

3. Sistem pemerikasaan

Pemeriksaan yang dilakukan telah berdasarkan kriteria seleksi. Penentuan Wajib Pajak yang SPT tahunannya lebih bayar diambil dari keluaran komputer, sehingga menjauhkan dari unsur subyektivitas. Pemeriksaan atas usul Kantor Pelayanan Pajak, dilakukan berdasarkan perbandingan data yang ada dalam komputer adan di usulkan terlebih dahulu ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan

pemeriksaan atas penghapusan NPWP adalah permintaan Wajib Pajak, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dan tertibnya administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan merupakan batas waktu selesainya pemeriksaan. Maksud dari adanya jangka waktu ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk Wajib Pajak. Dengan batas waktu ini wajib pajak tidak akan terganggu kegiatan usahanya. Bagi petugas pajak sendiri akan memberikan kemudahan dalam bekerja, karena pekerjaan tidak menumpuk. Pada umumnya pemeriksaan yang dilakukan selama tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan batas waktu pemeriksaan (lihat lampiran).

Adanya perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang telah ditetapkan paling lama sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) bulan untuk Pemeriksaa Kantor (PK), dan dapat diperpanjang lagi 3 (tiga) bulan lagi.
- b. 4 (empat) bulan untuk Pemeriksaan Lapangan (PL), dan dapat diperpanjang 4 (empat) bulan lagi.

Hal ini dipaparkan oleh Bapak agus seksi fungsional :

Isinya hampir sama cuman perbedaanya itu ada pada jangka waktu, kalau yang baru itu jangka waktu dihitung sejak SP turun, kemudian yang baru jangka waktu pemeriksaan lapangan 4 bulan bisa diperpanjang 4 bulan lagi.

5. Prosedur pemeriksaan

Untuk mencapai hasil pemeriksaan yang optimal, pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan pedoman

pemeriksaan pajak yang juga merupakan standar kualitas pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan merupakan tahapan-tahapan dilakukannya pemeriksaan, mulai dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak, sehingga kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai.

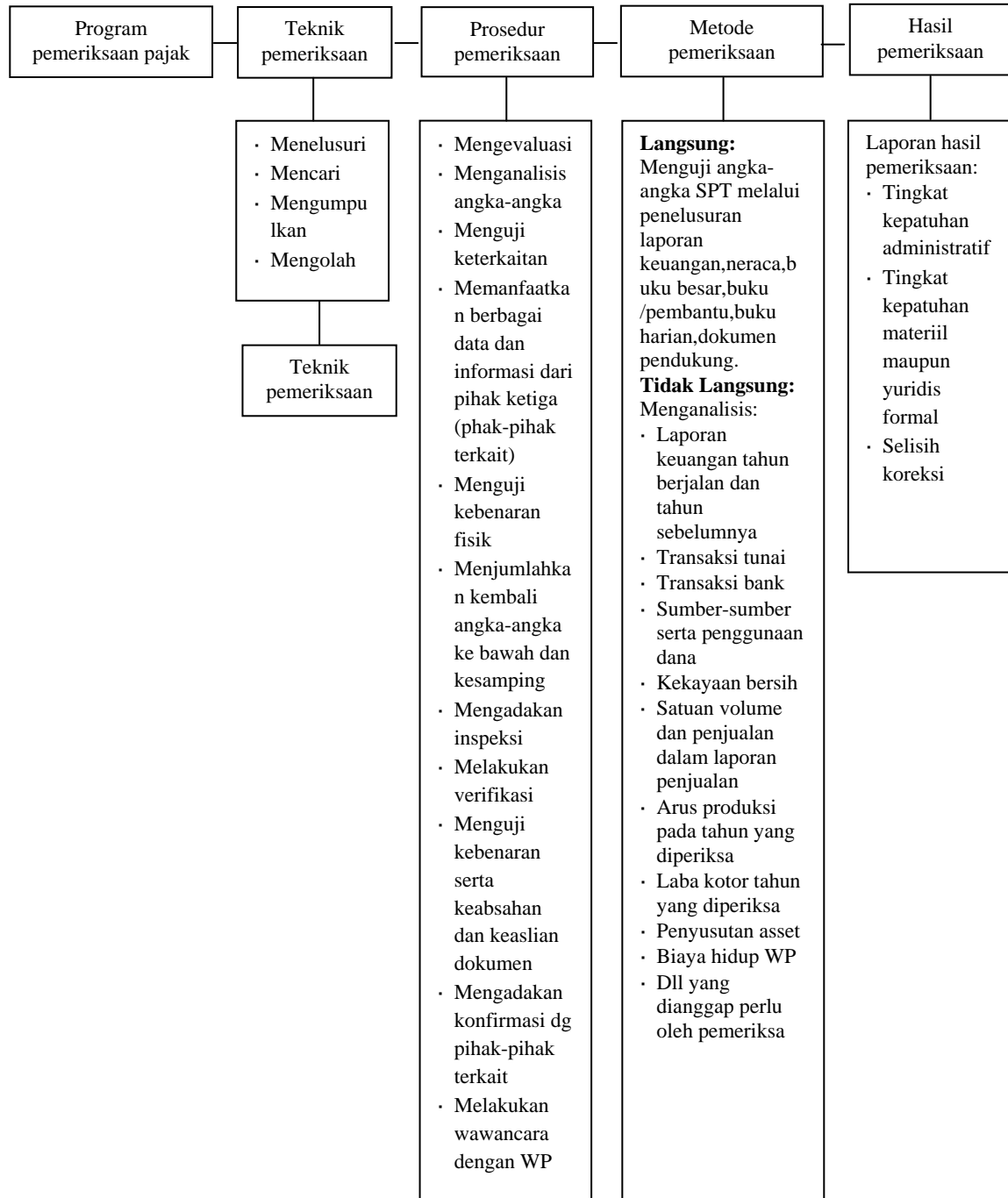
Berikut pemaparan Bapak Agus seksi fungsional :

Kami dibagian pemeriksaan itu kerjanya tim,tapi tim yg satu tidak boleh mengetahui apa yg diperiksa tim yang satunya, di sini dibagi menjadi 3tim, tim a,b, dan c. tata cara pemeriksaan itu sendiri sudah diatur oleh peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.03/207 kita tinggal mengikutinya. Kalu proses kerjanya pertama kita ada program pemeriksaan terlebih dahulu,kemudian mencari,mengumpul data2 yg dimaksud teknik pemeriksaan baru kita masuk ke prosedur pemeriksaan seperti halnya mengevaluasi serta menguji kemudian hasil dari pemeriksaan berupa kepatuhan WP itu tadi.

Dari hasil wawancara diatas serta triangulasi dari study literature Prosedur pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan di seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.



5.2.2 PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT.

Kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak antara lain melalui perubahan sistem pemungutan official assessment menjadi self assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan pemaparan ibu lestari seksi waskon :

Self asesment itu, WP mendaftarkan diri, menyetor, melaporkan, dan hitung pajaknya sendiri.

Sistem self assessment sebagai upaya untuk memberdayakan Wajib Pajak memerlukan penyesuaian perilaku dan sistem nilai, baik pada Wajib Pajak maupun aparat perpajakan. Pemerintah menyadari bahwa pembaharuan sistenm perpajakan memang sangat dibutuhkan dan perlu disertai dengan upaya pembenahan aparat perpajakan, baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin kerja, maupun sikap mental para petugas, serta pelayanan optimal.

Pada dasarnya kebijaksanaan pemungutan pajak merupakan wujud pengabdian, kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pajak sebagai pencerminan kesadaran di bidang perpajakan adalah berada pada Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai fungsinya hanya berkewajiban melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan mengukurnya apakah kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh Wajib Pajak yang telah diberi kepercayaan demikian luas melalui sistem self assessment, dan sebagai pemberdayaan terhadap Wajib Pajak, pemerintah dalam hal ini unsur aparat perpajakan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan sebagai tindakan pengawasan agar peraturan perpajakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment dilaksanakan melalui sistem pengawasan interaktif (interactive control system) dan sistem kepercayaan (beliefs system). Sistem pengawasan interaktif yakni memusatkan pada informasi objek pengawasan yang senantiasa berubah sehingga menuntut perhatian pemeriksa, supaya data hasil pengawasan dapat ditafsirkan dengan baik. Sedangkan pengawasan melalui sistem kepercayaan, dimaksudkan untuk memotivasi Wajib Pajak agar dapat melakukan perhitungan pajak dengan tepat dan benar, melakukan pengisian Surat Pemberitahuan sesuai data dan informasi yang sebenarnya.

Akan tetapi di KPP Pratama Pamekasan banyak masyarakat yang mempunyai NPWP tidak mengerti system self assesment sehingga karena tingkat pendidikan yang rendah. Untuk WP Badan tingkat kebanyakan mereka mengerti mengenai self assesment karena WP badan pendidikannya cukup tinggi.

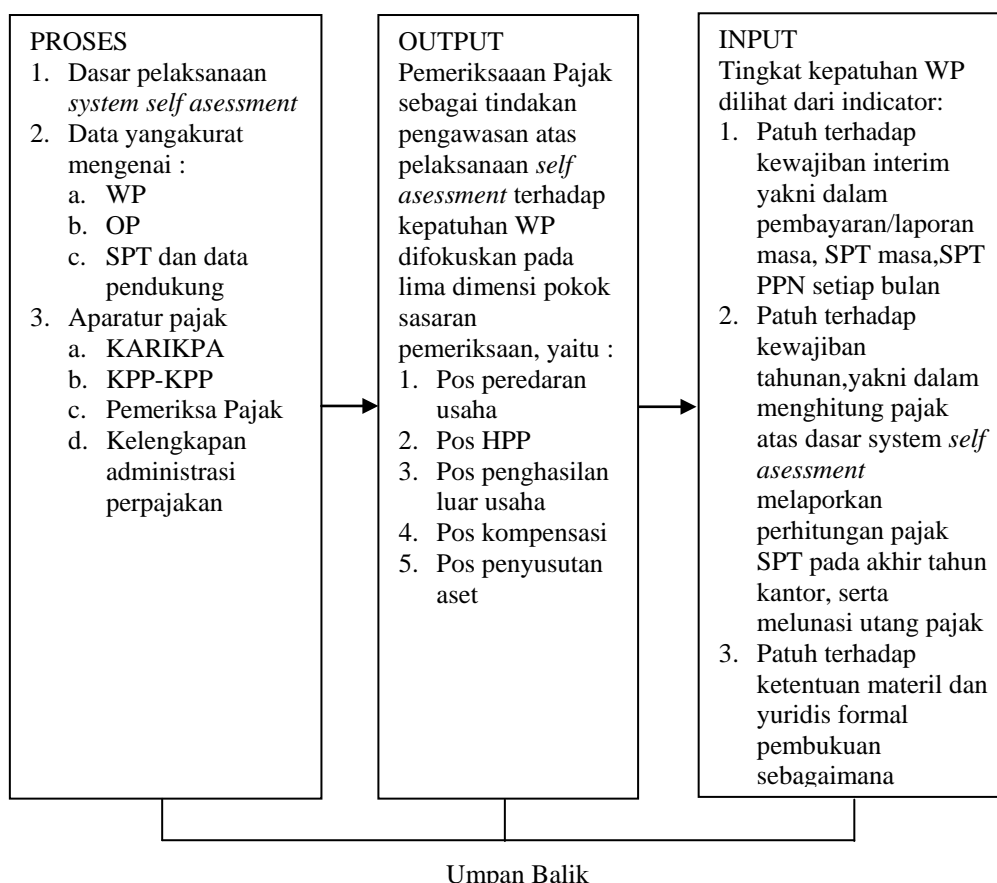
Berikut pemaparan Ibu Lestari :

Di KPP pratama kebanyakan yang kurang mengerti tentang self assesment mungkin dari segi pendidikan yang kurang.mereka punya NPWP karna untuk Haji/umroh sama jadi TKI setelah itu selesai.akan tetapi untuk WP badan hampir semua WP badan mengerti, mungkin karena jumlah WP badan yang sedikit serta tingkat pendidikan WP badan yang tinggi.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem self assessment, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijaksanaan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh sebagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kerangka pemikiran tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self assessment secara sederhana dapat divisualisasikan pada gambar berikut:

GAMBAR 3.



Sebagai upaya melaksanakan system self asesment bagi Wajib Pajak dengan pengisian SPT Tahunan secara benar dan mencerminkan keadaan usaha yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dari kebenaran material atau isi yang terkandung dalam SPT Tahunan PPh Pasal 25.

Penelitian ini memperhatikan 4 variabel, yaitu meliputi :

1. Peredaran Usaha
2. Harga Pokok Penjualan
3. Biaya-biaya
4. Kredit Pajak

Dari hasil pencarian, pengumpulan dan pengolahan data yang ada diperoleh hasil sebagai berikut :

Penjelasan lebih lanjut dari table tersebut :

1. Peredaran Usaha

Pemeriksaan terhadap 27 wajib Pajak, Nampak 10 Wajib Pajak yang terkoreksi peredaran usahanya, dengan tingkat koreksi antara 100,07% - 104,78%

2. Harga Pokok Penjualan

Terdapat 9 Wajib Pajak yang terkoreksi atas Harga Pokok Penjualan, dengan tingkat koreksi antara 100,78% - 436,55%

3. Biaya-biaya

Atas pemeriksaan 27 Wajib Pajak, terdapat 24 Wajib Pajak yang terkoreksi biaya-biayanya, dengan tingkat koreksi antara 46,02% - 140,3%

4. Kredit Pajak

Pemeriksaan atas kredit pajak terdapat 5 Wajib Pajak yang terkoreksi, dengan koreksi sebesar Rp 141.636.866

Dari pemeriksaan yang dilakukan atas SPT Tahunan PPh Pasal 25 selama tahun 2010 tersebut, menyebabkan munculnya selisih pajak penghasilan yang terutang PPh pasal 25, yaitu sebesar Rp 329.921.052

5.2.3 PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada dasarnya tercermin dari tiga hal, yaitu :

1. Pemenuhan kewajiban interim, dalam hal ini adalah kewajiban pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 yang dilaksanakan tiap bulan.

2. Pemenuhan kewajiban tahunan, yaitu menghitung dan melunasi utang pajak, serta melaporkan perhitungannya dalam Surat Pemberitahuan di akhir tahun.
3. Pemenuhan ketentuan material yuridis formal perpajakan melalui perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta berbagai transaksi keuangan lainnya untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan Wajib Pajak.

Pemenuhan Kewajiban WP Badan di KPP Pratama Pamekasan cukup tinggi hal ini dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang tinggi.

Berikut penuturan ibu lestari :

Rendah sekalilah mbak, bagaimana mau paham tingkat pendidikannya juga rendah selain itu ada masyarakat yang memang sengaja mengabaikan pajak, jadi sudah tau tai pura-pura tidak tau. Kalo wp badan pendidikannya rata-rata tinggi, jadi WP badan disini cukup mematuhi kewajibannya.

Dalam pembahasan ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari pembayaran dan pelaporan PPh pasal 29 serta pelaporan SPT Tahunan ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian atas 27 Wajib pajak, diketahui bahwa hampir seluruh Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran secara tepat waktu atas pembayaran PPh pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25. Batas penyeteroran PPh pasal 29 adalah tanggal 25 Maret dan batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak 30 April.

Berikut ini disampaikan rincian tingkat kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan (lihat lampiran) :

1. Wajib pajak yang terlambat setor PPh pasal 29 : 1 Wajib Pajak
2. Wajib Pajak yang tidak setor PPh Pasal 29 : 2 Wajib Pajak
3. Wajib Pajak yang tidak terlambat setor PPh pasal 29 : 24 Wabib Pajak
4. Wajib pajak yang terlambat memasukkan
SPT tahunan PPh pasal 25 : 2 Wajib Pajak
5. Wajib pajak yang tidak memasukkan
SPT tahunan PPh pasal 25 : (-) tidak ada
6. Wajib pajak yang tidak terlambat memasukkan
SPT tahunan PPh pasal 25 : 25 Wajib Pajak

Dari hasil wawancara mengenai “Apakah WP mengerti tentang peraturan bagaimana menjadi seorang WP yang patuh“:

“Ada yang mengerti dan tidak, tapi kalau untuk WP badan kebanyakan yang mengerti karena rata-rata mereka S1 pendidikannya”(ibu lestari)

Serta pemaparan dari CV A tentang kupa tuhan WP

”Alhamdulillah patuh,karena kalu tidak bisa ada sanksi.”

Serta dari hasil penelitian dokumen internal dapat disimpulkan bahwa WP badan di KPP Pratama Pamekasan tergolong cukup patuh.

BAB VI

PENUTUP

Sejak tahun 1983 sistem official assessment telah mengalami perubahan dengan diberlakukannya system self assessment. Sistem self assessment ini memberikan dampak perubahan kewenangan, yaitu penetapan besarnya hutang pajak dari petugas pajak (fiskus) kepada Wajib Pajak. Dengan diterapkannya system self assessment tentu membawa konsekuensi penyempurnaan system pengawasan dari system sebelumnya. Sebab suatu pendelegasian wewenang tanpa dilengkapi system pengawasan yang memadai justru akan menimbulkan dampak yang kurang baik.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan di setiap Kantor Pelayanan Pajak merupakan salah satu upaya pengawasan yang dilakukan fiskus. Pengawasan ini meliputi pengawasan atas pelaksanaan system self assessment dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sejauhmana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan dapat diketahui dari kegiatan pemeriksaan pajak. Disamping untuk kepentingan fiskus dalam hal ini tentunya kegiatan pemeriksaan tidak boleh mengabaikan hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak.

6.1 KESIMPULAN

Pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan khususnya seksi PPh Badan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di setiap Kantor Pelayanan Pajak. Kegiatan ini telah mengikuti prosedur pemeriksaan pada umumnya yaitu meliputi persiapan

pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemeriksaan pajak ini telah memperhatikan pelaksana pemeriksaan, jenis pemeriksaan, system pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan.

Penelitian atas pelaksanaan system self asessment di seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan menunjukkan hasil bahwa pada umumnya Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan munculnya koreksi-koreksi atas hasil pemeriksaan. Dengan adanya koreksi-koreksi dalam pemeriksaan tersebut, menyimpulkan bahwa masih cukup banyak Wajib Pajak yang belum benar dalam pengisian SPT Tahunan PPh pasal 25, terlepas dari unsure kesengajaan ataupun tidak. Besarnya selisih jumlah pajak yang terutang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak selain kegiatan pengawasan pada dasarnya juga dapat memperbesar jumlah penerimaan pajak.

Penelitian atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berkaitan dengan kewajiban administrasi perpajakan menunjukkan bahwa pada umumnya Wajib Pajak cukup patuh mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Karena hanya beberapa Wajib Pajak yang terlambat dalam pembayaran pasal 29, begitu pula untuk pelaporan SPT Tahunan Pasal 25. Hal ini menunjukka kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban administrasi perpajakan sudah cukup tinggi.

6.2 SARAN

Pemeriksaan pajak merupakan alat pengawasana pelaksanaan system self asesment dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Mengingat fungsinya yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Kantor Pelayan Pajak dari sisi penerimaan, maka kegiatan pemeriksaan masih perlu digiatkan. Semakin banyak SPT Tahunan PPh pasal 25 yang diperiksa akan lebih baik karena semakin banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Pelaksanaan pemeriksaan hendaknya tidak mengabaikan hak-hak Wajib Pajak dan asas keadilan bagi Wajib Pajak. Agar pemeriksaan Pajak benar-benar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka hendaknya :

1. Disertai dengan upaya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak, Baiknya bimbingan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dilakukan secara intens secara merata kedaerah-daerah.
2. Memberi penyuluhan kepada WP tidak sekedar hanya teoritis tapi juga diberikan bimbingan secara Praktik, sehingga akan membuat masyarakat jauh lebih mengerti

Tabel 1 : Desain Studi

Main Research Question :

Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Kepatuhan Wajib Pajak

Mini Research Question	Sumber Data	Metode	Pelaksanaan	Justifikasi
1. Bagaimana kebijakan pemeriksaan pajak dan penerapannya serta dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?	<p>Dokumen-dokumen yang mendukung diterapkannya pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan <i>system self assessment</i></p> <p>Seksi Pemeriksaan</p>	<p>Analisis Dokumentasi</p> <p>Wawancara</p>	<p>Analisis dokumentasi dilakukan selama penelitian berlangsung tentang Struktur organisasi, Peraturan yang berlaku, dan mekanisme diterapkannya system pemeriksaan pajak. Selain itu penulis membandingkan dengan literatur yang ada.</p> <p>Tiap Wawancara dilakukan selama satu sampai dua jam dengan menggunakan semi structured interview. Alat-alat</p>	<p>Dari dokumen tersebut diharapkan penulis bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dan sistem pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan serta dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan pihak yang berkepentingan atas penelitian ini.</p>

	Studi Literatur		yang digunakan adalah recorder dan notes. Kemudian penulis membandingkan dengan literature yang ada	
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sehubungan dengan diterapkannya system self assessment sejak tahun 1983 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?	Seksi Waskon I Seksi Waskon II Study literatur	Wawancara dan observasi	Tiap Wawancara dilakukan selama satu sampai dua jam dengan menggunakan semi structured interview. Alat-alat yang digunakan adalah recorder dan notes. Kemudian penulis membandingkan dengan literature yang ada	Dari hasil wawancara, penulis bisa mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.
3. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?	Dokumen-dokumen internal	Pengujian dokumen internal		Dokumen internal untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Main Research Question :

Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Kepatuhan Wajib Pajak

Main Research Question	List Reseach Question	List Research Question
1. Bagaimana penerapan kebijaksanaan pemeriksaan di seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan	1. Seperti apa kebijaksanaan pemeriksaan pajak?	<ol style="list-style-type: none">1. Seperti apa kebijaksanaan pemeriksaan pajak?2. Pemeriksaan merupakan alat untuk menguji tingkat kepatuhan WP, berbeda dengan pemeriksaan akuntansi, apa yang dimaksud dengan hal tersebut?3. Apa perbedaan dari pemeriksaan perpajakan dengan pemeriksaan akuntansi?4. Adakah kebijaksanaan khusus dalam pemeriksaan pajak terhadap WP?5. Jika ada, seperti apa kebijaksanaan khusus yang dilakukan KPP Pratama Pamekasan?

	<p>2. Bagaimana penerapan kebijaksanaan pemeriksaan di seksi PPh Badan?</p>	<p>6. Apakah ada perlakuan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan?</p> <p>7. Jika ada, perlakuan khusus seperti apa serta mengapa ada perlakuan khusus terhadap WP?</p> <p>1. Bagaimanakah perbandingan sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan kebijaksanaan pemeriksaan di KPP Pamekasan?</p> <p>3. Bagaimana proses Pemeriksaan Perpajakan yang merupakan alat untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak?</p> <p>4. Hal apa saja yang diperiksa dalam pemeriksaan pajak?</p>
--	---	---

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah proses pemeriksaan yang diterapkan akan tetapi tidak ada dalam peraturan tertulis tertulis? 6. Jika ada, proses pemeriksaan seperti apa yang tidak tertulis? 7. Adakah sanksi jika terdapat prosedur yang tidak sesuai pelaksanaannya dengan peraturan yang berlaku?
<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimakah pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sehubungan dengan diterapkannya system self assessment sejak tahun 1983? 	<p>Seksi Waskon :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perpajakan semenjak diterapkannya system self assessment di KPP Pratama Pamekasan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan system self assessment? 2. Bagaimana pelaksanaan perpajakan semenjak diterapkan system self assessment di KPP Pratama Pamekasan? 3. Di KPP Pratama Pamekasan adakah keluhan-keluhan WP mengenai penerapan system self assessment? 4. Apa saja yang menjadi keluhan WP semenjak diterapkannya system self assessment?

		<p>5. Bagaimana Tingkat pemahaman Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan sejak diterapkannya system self assessment?</p> <p>6. Dengan diterapkannya system self assessment di KPP Pratama Pamekasan adakah perasaan kebingunan Wajib Pajak dalam melaksanakan system self assessment?</p> <p>7. Apakah ada kesulitan dalam penerapan sistem self assessment di KPP Pratama Pamekasan?</p> <p>8. Jika ada, apa yang menjadi kendala dalam penerapan pelaksanaan system self assessment di KPP Prattama pamekasan?</p> <p>9. Apakah ada solusi yang dilakukan oleh KPP pratama Pamekasan untuk mengatasi kendala yang terjadi?</p> <p>10. Dengan adanya solusi tersebut efisien serta efektifitaskah pelaksanaannya?</p>
--	--	--

	<p>2. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak semenjak diterapkannya system self assessment?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak? 2. Apakah Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan mengerti serta paham tentang Kewajiban Wajib Pajak dalam perpajakan? 3. Bagaimana tingkat pemahaman Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan mengenai Kewajiban Perpajakan? 4. Jika ada yang kurang mengerti terhadap Kewajiban Perpajakan, apa yang menjadi kendala si WP kurang mengerti serta paham? 5. Bagaimana pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak semenjak diterapkannya system self assessment? 6. Apakah dengan diterapkannya system self assessment Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan mudah dan tidak merasa kebingungan dalam melaksanakan Kewajiban Pajaknya?
--	--	--

	<p>3. Adakah kesulitan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak?</p>	<p>7. Jika ada Wajib Pajak yang kurang mengerti serta kurang paham mengenai Kewajiban pajak, hal apa saja yang dilakukan KPP terhadap Wajib Pajak supaya WP mengerti serta paham mengenai Kewajiban WP?</p> <p>1. Adakah kesulitan pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak?</p> <p>2. Jika ada kesulitan dalam pemenuhan Kewajiban WP, mengapa si WP merasa kesulitan dalam pemenuhan Kewajiban Pajak tersebut?</p> <p>3. Jika iya, apa yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan?</p> <p>4. Jika ada kendala, cara mengatasi kendala kesulitan Kewajiban Pajak di KPP Pratama Pamekasan?</p>
--	--	---

	<p>4. Apa ada dampak bagi KPP Pratama Pamekasan jika ada WP yang tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai Wajib Pajak?</p>	<p>5. Apakah yang menjadi kendala kesulitan WP dalam pelaksanaan Kewajiban perpajakan?</p> <p>6. Adakah penanganan dari KPP Pratama Pamekasan dalam mengatasi kendala yang terjadi pada WP dalam pemenuhan Kewajiban Perpajakan?</p> <p>7. Dengan adanya penanganan tersebut apakah penanganan tersebut gejala efisien sehingga si WP bisa mengerti serta paham mengenai Kewajiban Perpajakannya?</p> <p>1. Apakah ada dampak bagi KPP Pratama Pamekasan yang tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai WP?</p> <p>2. Apa dampaknya bagi KPP Pratama Pamekasan jika tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai WP?</p>
--	---	---

	<p>Bagi Wajib Pajak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu paham serta mengerti tentang system self assessment yang diterapkan saat ini di Kantor Pajak? 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya dampak tersebut, bagaimana KPP Pratama Pamekasan mengatasi dampak tersebut? 1. Apakah bapak/ibu mengerti apa yang dimaksud dengan system self asesment? 2. Apakah Bapak/Ibu paham serta mengerti tentang Bagaimana pelaksanaan system self assessment yang diterapkan di Kantor Pajak? 3. Bagaimana menurut bapak/ibu pelaksanaan perpajakan dengan adanya system self asesment ini? 4. Apakah ada perasaan kebingungan atau kesulitan dari bapak/Ibu tentang pelaksanaan system self asesment? 5. Jika, ada kesulitan apa yang membuat ibu merasa kebingungan/kesulitan?
--	---	--

	<p>2. Apakah Bapak/Ibu paham mengenai kewajiban Wajib Pajak?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu mengerti tentang Kewajiban bapak/ibu sebagai WP? 2. Menurut bapak/ibu apa saja Kewajiban perpajakan sebagai WP? 3. Menurut Bapak/ibu bagaimana pelaksanaan kewajiban Perpajakan sejak diterapkannya system self asessment? 4. Selama ini adakah kesulitan dari bapak/ibu dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan? 5. Jika ada, Apa yang membuat Bapak/ibu merasa kesulitan dalam melaksanakan Kewajiban WP?
--	--	---

<p>5. Bagaimanakah Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?</p>	<p>Bagi seksi Wakon :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dan seperti apa yang dikatakan dengan Wajib Pajak Patuh? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apa yang dikatakan dengan Wajib Pajak Patuh? 2. Apakah WP mengerti tentang peraturan bagaimana menjadi seorang WP yang patuh? 3. Bagaimana Upaya untuk membuat WP sadar serta paham tentang kepatuhan WP dari KPP Pratama pamekasan agar WP patuh? 4. Dengan adanya upaya tersebut apakah ada kendala dalam mengatasi WP yang tidak patuh? 5. Dengan adanya upaya tersebut apakah WP menjadi sadar bagaimana kepatuhan WP?
---	---	---

	<p>2. Bagaimakah Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pamekasan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya? 2. Jika, rendah/tinggi apa yang menjadi penyebab dari tingkat kepatuhan WP yang rendah/tinggi? 3. Apa yang menjadi kendala penyebab tingkat kepatuhan WP di KPP pratama rendah? 4. Jika rendah, bagaimana cara mengatasi tingkat kepatuhan WP yang rendah? 5. Adakah penindak lanjutan dari KPP jika ada WP yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai WP? 6. Jika ada, apa penindak lanjutan dari KPP terhadap WP yang kurang patuh? 7. Bagaimana proses penindak lanjutan bagi WP yang tidak patuh?
--	--	---

	<p>3. Apakah Dampak dari tingkat kepatuhan wajib pajak rendah/tinggi bagi KPP Pratama Pamekasan?</p>	<p>8. Apakah dengan adanya penindak lanjutan bagi WP yang tidak patuh akan membuat WP patuh serta sadar diri untuk memenuhi kewajibannya sebagai WP?</p> <p>1. Apakah ada Dampak dari tingkat kepatuhan wajib pajak rendah/tinggi bagi KPP Pratama Pamekasan?</p> <p>2. Seperti apa dampak dari tingkat kepatuhan WP yang rendah yang mempengaruhi KPP Pratama Pamekasan?</p> <p>3. Dengan adanya dampak tersebut perlakuan seperti apa yang diberikan oleh KPP terhadap WP supaya tingkat kepatuhannya meningkat?</p> <p>4. Apakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Pamekasan memberikan hasil sehingga dampak menjadi berkurang?</p>
--	--	--

	<p>4. Apakah ada penanganan secara khusus bagi Wajib Pajak yang tidak patuh?</p> <p>Bagi Wajib Pajak :</p> <p>1. Apakah Bapak/ibu mengerti serta paham mengenai Wajib Pajak yang dikatakan Patuh dalam melaksanakan Perpajakannya?</p>	<p>1. Apakah ada penanganan secara khusus jika ada Wajib Pajak yang tidak patuh?</p> <p>2. Jika ada, seperti apa penanganan khusus yang di laksanakan oleh KPP Pratama Pamekasan?</p> <p>3. Mengapa ada penanganan khusus?dan untuk WP yang bagaimana yang perlu penanganan khusus?</p> <p>4. Apakah dengan penanganan khusus yang diberikan oleh KPP Pratama membuat WP menjadi patuh?</p> <p>1. Apakah bapak/ibu mengerti tentang Kewajiban WP untuk Patuh terhadap peraturan perpajakan?</p> <p>2. Apakah Bapak/ibu mengerti serta paham mengenai Wajib Pajak yang dikatakan Patuh dalam melaksanakan Perpajakannya?</p>
--	--	---

	<p>2. Apakah selama ini bapak/ibu patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?</p> <p>3. Apa yang menjadi kendala serta kesulitan bapak/ibu tidak patuh dalam perpajakan?</p>	<p>3. Jika iya, menurut bapak/ibu seperti apa yang dikatakan si WP patuh?</p> <p>1. Apakah selama ini bapak/ibu patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu selalu melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu?</p> <p>3. Jika tidak, mengapa bapak/ibu tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?</p> <p>1. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan jika ibu/bapak tergolong tidak patuh, Apa yang menjadi kendala serta kesulitan bapak/ibu tidak patuh dalam perpajakan?</p> <p>2. Apa yang membuat Bapak/ibu tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban WP?</p>
--	---	---

		<p>3. Apakah bapak./ibu merasa kesulitan/kebingungan sehingga ibu tidak patuh?</p> <p>4. Apakah pelayanan dari KPP Pratama Pamekasan kurang sehingga bapak/ibu tidak patuh?</p> <p>5. Apakah ibu/bapak tau dampak jika WP tidak patuh dalam memenuhi Kewajibannya sebagai WP?</p>
--	--	---

DAFTAR PUSTAKA

- Arens dan Loebbecke. 1996. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Ariayudha, Henky. 2008. *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo P
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2007. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Departemen Keuangan RI, Persandingan susunan dalam satu naskah Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. 2008. Jakarta
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Supadmi, Ni Luh. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Yuhertiana, Indrawati. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. EurekaSmart Publishing
- www.depkeu.go.id. *APBN-P 2009*. Diakses tanggal 12 Januari 2011, jam 11.06 WIB
- www.Pajak.go.id. Diakses tanggal 26 Mei 2011, jam 18.30 WIB